

BAB III

PERSEPSI POLITIK MUHAMMADIYAH TERHADAP NEOLIBERALISME PADA MASA KABINET INDONESIA BERSATU JILID II

Setelah mengetahui dan mengenali lebih lanjut tentang Muhammadiyah secara organisatoris dan garis perjuangannya. Pada bagian ini akan dibahas persepsi politik Muhammadiyah mengenai neoliberalisme pada masa KIB Jilid II. Analisis pandangan ini tentunya tidak terlepas dari acuan kerangka dasar teori dan konseptual yang telah dibahas pada Bab I.

Misi neoliberalisme pada kenyataannya tidak hanya berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan politik, tapi juga kehidupan sosial masyarakat. Tatanan sosial, budaya, beserta institusi norma, secara langsung dan tak langsung juga tak lepas dari pengaruh dua arus besar ini. Pada titik inilah, gerakan sosial baru diperlukan sebagai gerakan alternatif. Dalam konteks inilah, hanya ada dua pilihan bagi asosiasi-asosiasi sosial: mengikuti arus, atau menjadi lokomotif gerakan alternatif. Problem ini juga yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Sebagai organisasi *civil society* yang besar di Indonesia, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi penyeimbang negara dan pasar yang menjadi kepanjangan tangan neoliberalisme.⁷³

Perlu diketahui, Secara umum, neoliberalisme dapat dipahami sebagai cara-cara untuk mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah.

⁷³ Globalisasi, Neoliberalisme dan the New Sosial Movement : Pengalaman Muhammadiyah oleh Zuly Qodir, Jogjakarta, 18 Agustus 2007

Dalam arti, mengusahakan agar barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi.

Secara lebih spesifik, Elizabeth Martinez dan Arnolde Garcia menyebutkan ada 5 (lima) Nilai dasar dari Neoliberalisme, yaitu:⁷⁴

1. Aturan Pasar.

Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial.

Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah.

3. Deregulasi.

Mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.

⁷⁴ Elizabeth Martinez dan Arnolde Garcia, *What is Neo-Liberalism?*, Third World Resurgence No. 99/1998, hlm. 7-8.

4. Privatisasi.

Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

5. Menghapus konsep barang-barang publik (public goods) atau komunitas.

Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Perlu diketahui rekam jejak neoliberalisme di Indonesia dapat ditelusuri dari masa pemerintahan Orde Baru sampai Orde Reformasi sekarang ini. Selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya secara rinci persepsi politik Muhammadiyah terhadap neoliberalisme.

A. Muhammadiyah dan Arus Informasi Neoliberalisme

Dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dengan sesuatu yang berkaitan informasi. Informasi adalah hasil proses data-data yang beragam yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan permintaan pengguna, tentunya

diungkapkan oleh Zuly Qodir Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)⁷⁷ mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

“Muhammadiyah lahir di sebuah negara yang menganut sistem ekonomi liberal atau neoliberalisme. Oleh karenanya, Mencari itu gampang, arus informasi mudah diperoleh baik yg dianggap baik atau jelek tergantung pribadi masing-masing. Tidak bisa dipungkiri manusia tidak bisa terlepas dari arus informasi. Karena arus informasi macam-macam ada. Muhammadiyah sigap dalam memberikan keterangan atau mengkritisi kepada pemerintah.”

Itulah cara Muhammadiyah dalam menyeleksi arus informasi terkait neoliberalisme, ketika banyak informasi maka Muhammadiyah dengan cepat menyeleksi manakah informasi terkait neoliberalisme. Ini menurut penulis dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman dan sudah berarti agar menemukan jalan penyelesaiannya mengembalikan kebangkitan republik. Disini agar memperjelas pemahaman mengenai kelangsungan hidup bangsa dalam perspektif pangan dan kebudayaan. Suatu perspektif yang bisa disebut terlalu melebar dan tidak fokus, tetapi justru menjadi bagian inti hubungan kompleksitas jalan penyelesaian masalah bangsa dari ancaman neoliberalisme dan kebangkitan kembali republik.⁷⁸

2. Pengaturan Arus Informasi terkait Neoliberalisme

Setelah Muhammadiyah menyeleksi informasi tersebut maka selanjutnya, Muhammadiyah mengatur arus informasi terkait neoliberalisme. Sebagaimana

⁷⁷ Wawancara dengan Zuly Qodir, di Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta 14 juni 2011

⁷⁸ Franciscus Welirang, *Revitalisasi Republik; perspektif pangan dan kebudayaan*, Grafindo: Jakarta selatan, 2007

diungkapkan oleh Haedar Nashir, Pimpinan Pusat Muhammadiyah⁷⁹, cara mengatur arus informasi tersebut adalah dengan :

“Cara mengaturnya Muhammadiyah kan punya jaringan organisasi sampai kebawah, lalu mempunyai mekanisme pertemuan, acara, bahkan ada permusyawaratan. Nah dari situlah arus informasi dibangun secara langsung melalui infrastruktur organisasi. Yang kedua, Muhammadiyah kan Mempunyai majalah-majalah (suara Muhammadiyah disamping itu juga ada majalah kampus) yang itu juga salah satu caranya media untuk mengkomunikasikan sikap Muhammadiyah dalam berbagai persoalan termasuk neoliberalisme.

Itulah Muhammadiyah dalam mengatur arus informasi terkait neoliberalisme, ketika informasi sudah diseleksi maka kemudian diatur sehingga diketahui oleh infrastruktur Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga tingkat ranting, caranya yang digunakan dengan media karena Muhammadiyah yang menjadi basis dari gerakan *Civil Islam*, basis munculnya gerakan kultural yang diharapkan akan mampu menjadi jembatan atas kebangkitan gerakan Islam politik di Indonesia. Posisi Muhammadiyah dalam karakteristik Islam Indonesia karena itu menjadi bagian yang tidak mungkin untuk dipisahkan dengan gerakan masyarakat sipil yang berkehendak melakukan gerakan sosial.

3. Interpretasi Arus Informasi terkait Neoliberalisme

Setelah diatur arus informasi tersebut maka langkah selanjutnya, adalah diinterpretasikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Maaruf (Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah)⁸⁰ yaitu sebagai berikut:

⁷⁹ Wawancara dengan Haedar Nashir, di Peleman Rt 04, jl. Sunan Kudus 18 samping gedung Ranting Muhammadiyah Tamantirto Yogyakarta 04 juli 2011

“MPM salah satu divisi yang patut dicermatin, pada saat muktamar 1 abad, MPM lagi-lagi menulis perlunya advokasi. Kesadaran kritis masyarakat mendapat informasi dan sebagainya, kalau tidak ada proses advokasi tidak bakalan bisa. Kita melakukan proses advokasi itu, termasuk menyadarkan bahwa kita berada dalam genggam gurita neolib”

Zuly Qodir juga menyampaikan tentang interpretasi neoliberalisme sebagai berikut:⁸¹

“Kadang neoliberalisme itu baik kadang neoliberalisme tidak baik, tergantung bagaimana menginterpretasikan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang mandiri yang tidak tergantung kepada donor-donor internasional. Oleh karenanya, Muhammadiyah sigap dalam memberikan keterangan atau mengkritisi kepada pemerintah.”

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Haedar Nashir terkait dengan interpretasi sebagai berikut:⁸²

“Kemudian lebih jauh lagi yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya institusi pendidikan diharap melahirkan tenaga didik yang tahan menghadapi persoalan. Kan persoalan kita dalam kehidupan itu memang disatu pihak, kita tidak boleh merusak dan disatu sisi membangun. Artinya ada azas keseimbangan menjadi prinsip dalam gerakan Muhammadiyah. Jadi, manusia itu perlu hidup perlu makan perlu tempat tinggal perlu kehidupan yang majemuk, tetapi hal-hal yang buruk hal negarif harus dihindari. Nah disini berlaku prinsip-prinsip mengutamakan kemaslahatan atau dalam situasi darurat mencegah kedaruratan itu diutamakan. Kalau dengan membangun lalu merusak maka merusak itu lebih diutamakan dibanding membangun. Media-media ini digunakan Muhammadiyah untuk proses penyadaran tentang masa depan yang akan dihadapi dimana kecendrungan ekonomi liberal.”

Itulah Muhammadiyah dalam menginterpretasikan terkait neoliberalisme, ketika informasi sudah diseleksi maka kemudian langkah terakhir interpretasi atau

⁸⁰ Wawancara dengan Ahmad Maaruf, di UMY, 18 juli 2011

⁸¹ Wawancara dengan Zuly Qodir, Op.cit

⁸² Wawancara dengan Haedar Nashir, Op. cit

sikap dan respon Muhammadiyah terhadap neoliberalisme. Karena seperti diketahui bahwa Dampak sesungguhnya dari neoliberalisme adalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negara-negara penganut neoliberalisme inti dari kapitalisme adalah bentuk yang paling jelas dari kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*). Kesenjangan pendapatan ekonomi antara negara kaya dan negara berkembang merupakan aspek pertama dalam kekerasan jenis ini. Ketidakadilan pendapatan juga sangat terasa dalam sistem kapitalis itu sendiri, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Implikasi dari tingkat keadilan yang tinggi ini, yang telah diteliti di sebagian besar negara-negara tersebut adalah bahwa sebagian manusia hidup dalam kemiskinan yang absolut. Menurut Bank Dunia, 1 milyar orang di dunia ketiga termasuk ke dalam kategori ini.⁸³

Tentu melihat ketimpangan ini, Muhammadiyah tidak tinggal diam dan sigap dalam menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi tentang neoliberalisme. Dan sesungguhnya inti dari itu semua adalah Muhammadiyah memberikan sikap tentang neoliberalisme baik di dunia maupun di Indonesia, dan Muhammadiyah memberikan kritikan-kritikan kepada kebijakan kepada yang telah dibuat pemerintah Indonesia, sehingga yang dicita-citakan tentang ekonomi kerakyatan dapat terwujud, yang juga terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yaitu:

⁸³ Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2003 hal 132

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

B. Persepsi Politik Muhammadiyah Terhadap Neoliberalisme

Neoliberalisme dapat dipahami sebagai cara-cara untuk mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Dalam arti, mengusahakan agar barang-barang, sumber daya dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak dalam upaya mendapatkan sumber daya yang lebih mudah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi.

Wacana globalisasi yang berbaju dan bertangan neoliberalisme telah menciptakan sebuah peradaban dunia yang penuh eksploitatif, hal ini terbukti berbagai para peneliti dari segala bidang dan ruang lingkup keilmuan telah menyatakan bahayanya neoliberalisme kapitalistik. Sebagai gejala dan proses yang tak pernah terukur bahwa globalisasi memang menjadi sangat layak untuk senantiasa di bicarakan di manapun kita berada, karena gerakan globalisasi yang berbaju dan berkaki tangan neoliberal ini telah menggurita tanpa meninjau kembali aspek kemanusiaan baik dalam aspek ekonomi maupun politik dan hukum. Wacana globalisasi dan neoliberal ini telah menciptakan sebuah mesin yang setiap saat menggeliat dalam kerentanan kehidupan dan sekaligus menjadi ancaman yang sangat

kesehatan, permodalan, bahan baku usaha, lahan dan cita-cita juga merupakan pola pemiskinan masif terhadap masyarakat bawah.⁸⁵

Disini Muhammadiyah perlu mempertajam visi gerakan Al-Ma'unnya. Ini dirasa lebih mendesak dilakukan karena proses atau kebijakan pemiskinan masif yang dilakukan Negara, pemerintah dan partai ditengarai sudah mulai memasuki level yang berbahaya bagi kemanusiaan. Yaitu ditengarai sudah masuk ke level kebijakan untuk melakukan pemiskinan masif masyarakat Indonesia.

Adapun persepsi politik Muhammadiyah tentang teori neoliberalisme berupa aturan pasar dinyatakan bahwa Neoliberalisme itu berkaitan dengan integrasi pasar. Cita-cita utama pasar bebas yang akan bekerja secara otomatis (*self-regulating*) adalah bagian yang secara normatif menjadi dasar dari globalisasi. Fungsi utama pasar bebas (yang didalamnya membayangkan adanya efisiensi, rasionalitas dan kemakmuran serta kemajuan untuk meningkatkan integrasi sosial dan kemakmuran-kemajuan material), hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat demokratis yang menghargai dan melindungi kebebasan individu. Para penganjur neoliberalisme dan globalisasi menuntut adanya "liberalisasi pasar" yakni deregulasi perekonomian nasional. Dikatakannya pandangan semacam itu tidak hanya akan memunculkan pasar global yang teintegrasi, namun sekaligus akan melahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia. Tatanan ekonomi yang memberikan

⁸⁵ SUARA MUHAMMADIYAH 12 / 96 | 16-30 JUNI 2011 "MENANGKAL PEMISKINAN MASIF DI INDONESIA : APA PERAN MUHAMMADIYAH?"

kebebasan ekonomi secara langsung yakni kapitalisme kompetitif, juga akan mendorong kebebasan politik sebab ia akan memisahkan kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara keduanya.⁸⁶

Muhammadiyah di Indonesia posisinya memang cukup strategis untuk membuat gerakan sekaligus untuk menjadi basis legitimasi atas kampanye apa saja, termasuk kampanye untuk menentang globalisasi dan neoliberalisme. Dalam bidang ekonomi, penjualan aset ekonomi negara yang berada di bawah BUMN, seperti Indosat, Telkomsel, dan beberapa usaha perbankan, diupayakan dijual kepada swasta sehingga tidak ada lagi kepemilikan negara atas aset-aset nasional. Kebijakan swastanisasi BUMN adalah bukti konkret proyek neoliberalisme ekonomi dan politik dunia yang sekarang tengah marak di Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah masuknya perusahaan-perusahaan asing TNCs ke Indonesia dengan sempurna, seperti Shell yang menyaingi Pertamina, Danone, dan perusahaan asing lainnya. Muhammadiyah beranggapan bahwa kondisi aturan pasar bebas sudah terjadi sejak zaman orde baru bahkan setelah era reformasi bahkan hingga pemerintahan KIB Jilid II aturan pasar lebih bebas.

Adapun persepsi politik Muhammadiyah tentang teori neoliberalisme berupa Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial dinyatakan bahwa Dengan menggunakan dukungan negara-negara kuat di belahan Utara, lembaga-lembaga

⁸⁶ B. Steger, Manfred, *Globalisme: Bangkutnya Ideologi Pasar*, Lafald, 2006

internasional semacam IMF, WTO dan Bank Dunia, sebagai para pengusung globalisme, mendulang keuntungan yang maha dahsyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sering kita kenal dengan sebutan “Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip “Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh negara-negara pengutang di dunia salah satu diantaranya adalah Mengurangi pengeluaran publik, khususnya militer dan administrasi publik baik itu bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang publik lainnya.

Sehingga ini memberikan persepsi politik Muhammadiyah terhadap mengurangi pengeluaran publik yaitu adanya prioritas yang harus diutamakan untuk hajat hidup orang banyak antara lain untuk kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Selanjutnya terkait dengan anggaran, harus ada transparansi yang diutamakan, tidak boleh anggaran rutin lebih besar daripada anggaran pembangunan. Juga dibidang kesehatan, pelayanan kesehatan untuk masyarakat bawah harus dijadikan kebijakan yang melekat pada kebijakan negara. Jadi soal anggaran, Muhammadiyah sebagai organisasi swasta meminta pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk hajat hidup pembangunan.

Adapun persepsi politik Muhammadiyah tentang teori neoliberalisme berupa Deregulasi dinyatakan bahwa Dalam teori neoliberalisme dengan adanya deregulasi Tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan globalisasi sangat kondusif bagi terciptanya masyarakat sipil dan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah yang

kuat dan struktur masyarakat inilah yang akan mendorong demokrasi.⁸⁷ Muhammadiyah beranggapan dengan adanya deregulasi negara akan semakin lepas tangan terhadap kondisi perkembangan negara ini sehingga Muhammadiyah memandang harus ada reformasi birokrasi, kalau tidak regulasi hanya menjadi regulasi saja tanpa implementasi.

Adapun persepsi politik Muhammadiyah tentang teori neoliberalisme berupa Privatisasi dinyatakan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sering kita kenal dengan sebutan “Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip “Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh negara-negara pengutang di dunia salah satu diantaranya adalah Privatisasi BUMN, demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik. Fenomena yang terjadi pada pemerintahan KIB Jilid II adalah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meminta jadwal pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan izin privatisasi beberapa perusahaan plat merah. Perusahaan negara yang saat ini masih butuh restu DPR dalam melakukan privatisasinya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII. Sementara perusahaan plat merah yang sudah siap masuk lantai bursa antara lain: PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara privatisasi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan dilakukan melalui penerbitan saham baru

⁸⁷ B. Steger, Manfred, *Globalisme: Bangkutnya Ideologi Pasar*, Lafald, 2006

Posisi Muhammadiyah dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebenarnya kita jangan sampai mengikuti arus, arus tersebut sudah masuk dalam perilaku masyarakat dan berbangsa kita, bagaimana kita mengelminir? 1. Dampak 2. Membangun kesadaran masyarakat, bahwa itu tidak semuanya baik. Dalam islam, ekonominya lebih pada ekonomi kerakyatan yang terkelola bukan pasar bebas.

Adapun persepsi politik Muhammadiyah tentang teori neoliberalisme berupa Menghapus konsep barang-barang publik (*public goods*) atau komunitas dinyatakan bahwa substansi kelahiran Muhammadiyah adalah Muhammadiyah hadir melakukan perubahan yang sifatnya radikal dari sisi pemikiran tapi dalam sisi aksi sangat santun dan cultural. Adanya neoliberalisme tidak hanya menyerang pada sisi ekonomi tapi juga menyerang dari sisi sosial dan ranah politik. Neolib membesar dan masuk ke dalam semua sendi khususnya dalam persepsi ekonomi pemberdayaan, itu membuat masyarakat berada dalam ketercerabutan dari akar bahwa kita hidup untuk apa. Dengan neoliberal mendorong kita pada materialisme, implikasinya adalah dalam perilaku bisnis, ekonomi yang itu dilembagakan dalam peraturan dan undang-undang itu menghisap sumber daya, celaknya yang dihisap posisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Disitulah, Muhammadiyah memberikan perlawanan atas neoliberal ini, bentuk perlawanannya kita melakukan proses pemberdayaan. Jadi, kalau ditegaskan lagi menurut Muhammadiyah, neoliberal itu adalah virus baru yang sebenarnya ini adalah juga terjadi pada umat-umat sebelumnya, Mereka juga dihisap oleh para penguasa yang orientasinya dua, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik.

Muhammadiyah melihat secara keseluruhan, KIB I dan II itu kurang memberi jaminan pada proses ekonomi politik dan budaya yang indah, proses penguatan, kemandirian, keswadayaan, potensi yang kita memiliki, karena kecenderungan pasar bebas tinggi, maka orientasi kebijakan liberal ini harus diubah pada masa yang akan datang. Kecenderungan pemerintahan neoliberalisme ini sangat kuat, walaupun tingkat pertumbuhan membaik tapi yang miskin.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, DR Haedar Nashir mengungkapkan tentang pentingnya mengkritisi neoliberalisme yang diterapkan pemerintah Kabinet Indonesia bersatu jilid II sebagai berikut:⁸⁸

“Jadi Muhammadiyah itu dalam muktamar satu abad mencoba memetakan dalam konteks tantangan global. Sesungguhnya tidak secara khusus tentang neoliberalisme tapi perkembangan ekonomi global kemudian proses globalisasi disatu pihak membawa perubahan-perubahan hidup positif kemajuan pada hidup manusia tapi pada saat yang sama menimbulkan suatu problem (ada problem krisis kemanusiaan modern, ada problem kerusakan lingkungan, problem krisis ekonomi global, ada problem perubahan kebudayaan masyarakat yang mengalami kesenjangan). Kesemua itu akibat dari pembangunan yang prinsipnya eksploitasi tetapi tidak melupakan islah-islah itu, membangun tetapi mempertimbangkan keseimbangan. Karena itu bagi Muhammadiyah neoliberalisme dalam suatu arus besar kapitalisme global dan ekonomi global itu memiliki problem, sehingga perlu kritik perlu proses membangun yang tidak merusak. Disinilah posisi Muhammadiyah.”

Konteks Neoliberalisme saat ini berupa Penjualan asset rakyat berupa kekayaan alam, pembuatan UU yang kapitalistik, perumusan program yang lebih memberi peluang kepada pihak asing untuk menghisap kekayaan alam dan untuk

⁸⁸ Wawancara dengan Haedar Nashir, Op. cit

menghisap kekayaan terakhir rakyat di pasar retail merupakan instrumen yang efektif untuk melakukan proses pemiskinan dan pemiskinan rakyat Indonesia. Dan ini membuat Muhammadiyah berperan menangkal problem kemiskinan ekonomi semacam ini? Karena Muhammadiyah sebagai organisasi penyeimbang pemerintah, maka tentu Muhammadiyah berupaya memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah terkait neoliberalisme.

Muhammadiyah memberi masukan, memberikan pikiran-pikiran, lalu juga menawarkan solusi bagaimana menghadapi perkembangan global dan ekonomi global yang mengarah pada neoliberalisme. Ini Muhammadiyah juga akan mengkaji dengan majelis tarjih dan lembaga-lembaga terkait untuk perkembangan kawasan baru dimana pusat geo-ekonomi politik budaya kan berpindah ke Timur (Cina). Perubahan geo-politik ekonomi budaya itu juga nanti akan mempengaruhi peta ekonomi dan politik global. Ini salah satu peran lembaga di Muhammadiyah untuk memberi masukan bagi Muhammadiyah menghadapi masa depan. Hal ini diungkapkan oleh Zuly Qodir untuk mengkomunikasikan hal tersebut sebagai berikut:⁸⁹

“Dengan cara rapat pimpinan, ada beberapa majelis, majelis pustaka dan informasi, majelis ekonomi, majelis pemberdayaan, majelis tarjih, dan lain sebagainya, mereka yang menentukan respon Muhammadiyah terhadap isu-isu tersebut”.

⁸⁹ Wawancara dengan Zuly Qodir, Op. cit

Memang patut dicermati bahwa yang paling berperan besar dalam neoliberalisme adalah pasar. Pasar bukanlah sekedar tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi dalam era globalisasi ekonomi dan kapitalisme global yang berperan diemban adalah semangat kerakusan yang sangat dominan memaksakan selera dan kehendaknya yang akan mencabut hak sosial rakyat. Sudah terbukti secara empirik dimana-mana, tak terkecuali di Indonesia, bahwa badan-badan usaha asuransi multinasional mengemban semangat mendominasi bisnis asuransi nasional.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang berinti pada neoliberalisme yang menyerahkan pada pasar akan mengakibatkan pada kebijakan yang telah dibuat tersebut akan menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak sosial dan rakyat kepada pihak ketiga (kekuatan pasar). Jadi, negara melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada rakyat.

Inilah yang menjadi penting bagi Muhammadiyah, karena menurut penulis ini sudah masuk dalam pembahasan-pembahasan bagian dari pandangan Muhammadiyah terhadap tantangan global, kemudian dalam konteks mikro ketika Muhammadiyah membahas pendidikan juga tidak bisa diorientasikan pada nilai-nilai yang mencabut karakter manusia. Nilai-nilai ekonomi kapitalisme neoliberalisme merupakan prinsip dari ekonomi liberal (ekonomi pasar bebas), dan ekonomi pasar bebas itu kemudian pada akhirnya menimbulkan nafsu keserakahan, dan menurut penulis konsep keserakahan masuk ke dalam kategori berlebihan, berlebihan dalam hal apapun bahkan berlebihan dalam agama tidak boleh, apalagi mencari keuntungan, apalagi

keuntungan atas nama membangun tapi merusak suatu ekosistem, dan menghilangkan budaya setempat dan masyarakat yang ingin membangun kekuatan dalam dirinya. Dan ini menjadi problem sehingga secara teologis bagi Muhammadiyah adalah problem-problem yang berlebihan. Dan ini Muhammadiyah sangat memperhatikan dan hal seperti ini perlu di jauhi yang nyata-nyata telah dijalankan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Maaruf⁹⁰ yaitu sebagai berikut:

“KIB II itu neoliberalisme, kental sekali dan warnanya jelas dan tidak terbantahkan, berbicara tidak padahal perilakunya dan faktanya jelas sangat berdampak, dan secara tegas rezim KIB dalam dua periode ini lebih merepresentasikan rezim yang neoliberalisme ini dan sangat tampak sekali. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.”

Dalam bidang ekonomi, penjualan aset ekonomi negara yang berada di bawah BUMN, seperti Indosat, Telkomsel, dan beberapa usaha perbankan, diupayakan dijual kepada swasta sehingga tidak ada lagi kepemilikan negara atas aset-aset nasional. Kebijakan swastanisasi BUMN adalah bukti konkret proyek neoliberalisme ekonomi dan politik dunia yang sekarang tengah marak di Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah masuknya perusahaan-perusahaan asing TNCs ke Indonesia dengan sempurna, seperti Shell yang menyaingi Pertamina, Danone, dan perusahaan asing lainnya.

Dengan gambaran singkat di atas, maka ada beberapa hal yang bisa diambil dari Islam (dalam arti pemeluk Islam) baik personal maupun tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, SI, Persis, sampai

⁹⁰ Wawancara dengan Ahmad Maaruf, Op. cit

dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam, lebih khusus lagi adalah Muhammadiyah.⁹¹

1. Perlu melakukan kajian serius tentang globalisasi, liberalisme (neoliberalisme) politik dan ekonomi dan *the New Sosial Movement* (NSM) sehingga ditemukan apa manfaat dan mudharatnya. Hanya dengan proses diskursif yang memadai akan terbangun sebuah konsepsi tentang apa globalisasi, liberalisme-neoliberalisme politik dan ekonomi serta NSM.

2. Sebab globalisasi dan liberalisasi ekonomi-politik sudah merupakan perkembangan yang nyaris *given*, tidak bisa ditolak keberlangsungannya, sehingga yang mungkin bisa dilakukan adalah membangun pendekatan non mainstream sehingga bisa menjadi counter atas adanya hegemoni wacana globalisasi dan liberalisme-neoliberalisme ekonomi dan politik. Pendek kata yang dibutuhkan sekarang adalah adanya *counter hegemony* atas paham globalisasi dan neoliberalisme ekonomi dan politik.

3. *The New Sosial Movement* akan dapat menjadi bagian dari gerakan sipil yang benar-benar mandiri ketika elemen-elemen dalam gerakan sosial tidak lagi bekerja secara sektarian-parokial, apalagi kaplingisasi masalah. Yang harus dibangun dari NSM adalah pembagian peran dan kerja gerakan yang samasama bermuara pada pemberontakan kebudayaan atau pemberontakan struktur dan sistem yang hegemonik

⁹¹ Globalisasi, Neoliberalisme dan the New Sosial Movement : Pengalaman Muhammadiyah oleh Zuly Qodir, Jogjakarta, 18 Agustus 2007

di tengah masyarakat, sebab yang akan terabaikan adalah masyarakat kebanyakan yang sering disebut sebagai rakyat jelata atau rakyat biasa, bukan aristokrat.

4. Umat Islam harus bersatu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dampak negatif globalisasi dan neoliberalisme ekonomi dan politik seperti kemiskinan umat, kebodohan akibat pendidikan mahal, kesengsaraan akibat masyarakat tidak mampu lagi berobat karena mahalnya biaya berobat akibat kebijakan pengurangan subsidi oleh Negara, semakin banyaknya jenis penyakit menular yang menimpa masyarakat miskin di Indonesia.

5. Umat Islam harus memberikan prioritas pada penanganan masalah-masalah konkrit di masyarakat yang menjadi kebutuhan umat, ketimbang mempersoalkan masalah-masalah yang masih *debatable* (seperti penerapan syariat Islam) apalagi menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Jika dulu NU, Muhammadiyah, SI, Persis bergerak pada level perbaikan masyarakat dari hal-hal syariat, sekarang sudah harus beranjak pada masalah kenegaraan dalam arti merespon kebijakan Negara tentang ekonomi dan politik.

6. Menempatkan posisinya sebagai gerakan moderat yang terus mendukung gerakan Islam moderat di Indonesia. Tidak terjebak dalam arus tarikmenarik pada gerakan Islam radikal, sehingga mampu berdiri sebagai wasit di tengah runyamnya masalah bangsa yang terus menguntitnya. Dengan menempatkan posisinya sebagai gerakan Islam moderat, dengan sendirinya akan menempatkan Muhammadiyah

sebagai gerakan masyarakat sipil yang mandiri, tidak terkooptasi oleh kelompok kepentingan khususnya kelompok kepentingan gerakan globalisme dan neoliberalisme yang berada di balik donor-donor internasional atau lembaga internasional.

7. Bila kita hendak mengikuti saran Ziauddin Sardar, maka pola kerja memperbaiki sistem ekonomi politik dunia digambarkan demikian:

a. Di mulai dengan cara pandang dunia (dasar filosofis) atau landasannya yakni epistemologinya yang di dasarkan pada etika syariah Islam, kemudian memiliki turunan-turunan pada bidang:

- Struktur sosial dan politik umat Islam
- Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi

b. Pengembangan ekonomi kewirausahaan yang akan menopang kemandirian sebuah negara (masyarakat) dan;

c. Kepekaan terhadap masalah lingkungan.